

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2022 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2023 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp4.464.635.080.497,28	
b. Belanja	Rp4.608.556.270.530,00	
Surplus / Defisit		(Rp143.921.190.032,72)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp224.475.499.831,21	
2. Pengeluaran	Rp0,00	
Pembiayaan Netto		Rp224.475.499.831,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp 80.554.309.798,49

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp129.625.163.484,72 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp4.594.260.243.982,00
 2. Realisasi Rp4.464.635.080.497,28
 - Selisih Lebih /(Kurang) Rp129.625.163.484,72
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp210.179.473.283,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp4.818.735.743.813,00
 2. Realisasi Rp4.608.556.270.530,00
 - Selisih Lebih /(Kurang) Rp210.179.473.283,00
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp80.554.309.798,28) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus/(defisit) Setelah Perubahan (Rp 224.475.499.831,00)

2. Realisasi	(Rp 143.921.190.032,72)
Selisih Lebih /(Kurang)	(Rp80.554.309.798,28)
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,21) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp224.475.499.831,00
2. Realisasi	Rp224.475.499.831,21
Selisih Lebih /(Kurang)	(Rp0,21)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp0,00
2. Realisasi	Rp0,00
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp224.475.499.831,00
2. Realisasi	Rp224.475.499.831,21
Selisih Lebih /(Kurang)	(Rp0,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp184.475.499.831,21
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp184.475.499.831,21
c. Subtotal (a - b)	Rp0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp80.554.309.798,49
e. Subtotal (c + d)	Rp80.554.309.798,49
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp0,00
g. Lain-lain	Rp0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp80.554.309.798,49

Pasal 5

Neraca per 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp5.214.427.767.253,94
b. Jumlah Kewajiban	Rp93.847.709.092,70
c. Jumlah Ekuitas	Rp5.120.580.058.161,24

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
1. Pendapatan	Rp4.147.783.795.680,67
2. Beban	Rp3.989.336.046.872,14
Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp158.447.748.808,53
b. Kegiatan Non Operasional	Rp9.177.991.456,00
c. Pos Luar Biasa	Rp0,00
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp167.625.740.264,53

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2024	Rp184.475.499.831,21
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp324.803.535.441,28
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan	(Rp468.724.725.474,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp40.000.000.000,00
e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran	Rp0,00
f. Lain-lain	Rp0,00
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024	Rp80.554.309.798,49

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp4.912.019.515.681,26
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp167.625.740.264,53
c. RK PPKD	Rp0,00
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp40.934.802.215,45
e. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp5.120.580.058.161,24

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan Sampai akhir tahun anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 11 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



IYAN EDIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(3/95/2025)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	44.999.999.663,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	4.999.999.663,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	44.999.999.663,00
	PEMBIAYAAN NETTO	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00	299.957.927.771,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	80.554.309.798,49	0,00	184.475.499.831,21

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	44.999.999.663,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	4.999.999.663,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	44.999.999.663,00
	PEMBIAYAAN NETTO	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00	299.957.927.771,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	80.554.309.798,49	0,00	184.475.499.831,21

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.482.665.000	4.324.585.242,00	(158.079.758)	96,47
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.516.184.968	4.271.069.291,00	(245.115.677)	94,57
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	71.542.112.500	71.541.812.500,00	(300.000)	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	633.529.000	630.168.000,00	(3.361.000)	99,47
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.529.000	505.268.000,00	(3.261.000)	99,36
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000	124.900.000,00	(100.000)	99,92
			Jumlah	(224.475.499.831)	(143.921.190.032,72)	80.554.309.798	64,11

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.482.665.000	4.324.585.242,00	(158.079.758)	96,47
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.516.184.968	4.271.069.291,00	(245.115.677)	94,57
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	71.542.112.500	71.541.812.500,00	(300.000)	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	633.529.000	630.168.000,00	(3.361.000)	99,47
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.529.000	505.268.000,00	(3.261.000)	99,36
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000	124.900.000,00	(100.000)	99,92
			Jumlah	(224.475.499.831)	(143.921.190.032,72)	80.554.309.798	64,11

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Audited) (Rp)
		(Rp)	%	
Jumlah Belanja Modal	514.135.348.073,00	478.767.157.553,00	93,12	373.623.487.361,00
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	61,66	24.313.927.365,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	61,66	24.313.927.365,00
JUMLAH BELANJA	4.102.523.663.525,00	3.898.671.210.923,00	95,03	3.437.462.158.423,47
BELANJA TRANSFER				
BELANJA BAGI HASIL				
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	39.907.478.888,00	34.252.775.007,00	85,83	28.784.091.205,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	39.907.478.888,00	34.252.775.007,00	85,83	28.784.091.205,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	622.026.885.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	676.304.601.400,00	675.632.284.600,00	99,90	44.477.288.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	676.304.601.400,00	675.632.284.600,00	99,90	666.504.173.000,00
JUMLAH TRANSFER	716.212.080.288,00	709.885.059.607,00	99,12	695.288.264.205,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.818.735.743.813,00	4.608.556.270.530,00	95,64	4.132.750.422.628,47
SURPLUS/DEFISIT	(224.475.499.831,00)	(143.921.190.032,72)	64,11	(115.482.427.940,65)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	184.475.499.831,00	184.475.499.831,21	100,00	344.957.927.434,86
Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00	344.957.927.434,86
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	40.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	4.999.999.663,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	44.999.999.663,00
PEMBIAYAAN NETO	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00	299.957.927.771,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	80.554.309.798,49	-	184.475.499.831,21

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Audited) (Rp)
		(Rp)	%	
Jumlah Belanja Modal	514.135.348.073,00	478.767.157.553,00	93,12	373.623.487.361,00
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	61,66	24.313.927.365,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	15.155.305.600,00	9.344.507.869,00	61,66	24.313.927.365,00
JUMLAH BELANJA	4.102.523.663.525,00	3.898.671.210.923,00	95,03	3.437.462.158.423,47
BELANJA TRANSFER				
BELANJA BAGI HASIL				
Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	39.907.478.888,00	34.252.775.007,00	85,83	28.784.091.205,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	39.907.478.888,00	34.252.775.007,00	85,83	28.784.091.205,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	622.026.885.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	676.304.601.400,00	675.632.284.600,00	99,90	44.477.288.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	676.304.601.400,00	675.632.284.600,00	99,90	666.504.173.000,00
JUMLAH TRANSFER	716.212.080.288,00	709.885.059.607,00	99,12	695.288.264.205,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.818.735.743.813,00	4.608.556.270.530,00	95,64	4.132.750.422.628,47
SURPLUS/DEFISIT	(224.475.499.831,00)	(143.921.190.032,72)	64,11	(115.482.427.940,65)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	184.475.499.831,00	184.475.499.831,21	100,00	344.957.927.434,86
Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00	344.957.927.434,86
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	40.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	4.999.999.663,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	44.999.999.663,00
PEMBIAYAAN NETO	224.475.499.831,00	224.475.499.831,21	100,00	299.957.927.771,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	80.554.309.798,49	-	184.475.499.831,21

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.146.325.700,00	1.130.933.000,00	(15.392.700,00)	98,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.325.700,00	505.933.000,00	(15.392.700,00)	97,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	19.695.700,00	14.628.500,00	(5.067.200,00)	74,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.695.700,00	14.628.500,00	(5.067.200,00)	74,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.695.700,00	14.628.500,00	(5.067.200,00)	74,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.799.798.000,00	1.787.873.000,00	(11.925.000,00)	99,33	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.799.798.000,00	1.787.873.000,00	(11.925.000,00)	99,33	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002		PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	41.017.300,00	41.017.300,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.017.300,00	41.017.300,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.017.300,00	41.017.300,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	82.031.000,00	82.031.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	82.031.000,00	82.031.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.031.000,00	82.031.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	63.808.000,00	63.683.000,00	(125.000,00)	99,80	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.808.000,00	63.683.000,00	(125.000,00)	99,80	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.808.000,00	63.683.000,00	(125.000,00)	99,80	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	48.240.000,00	48.240.000,00	0,00	100,00	
8.01	8								

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.146.325.700,00	1.130.933.000,00	(15.392.700,00)	98,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.325.700,00	505.933.000,00	(15.392.700,00)	97,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	19.695.700,00	14.628.500,00	(5.067.200,00)	74,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.695.700,00	14.628.500,00	(5.067.200,00)	74,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.695.700,00	14.628.500,00	(5.067.200,00)	74,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48.240.000	48.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.564.701.700	1.552.901.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah				3.573.233.009.852	3.410.559.545.501,00	514.135.348.073	478.767.157.553,00	15.155.305.600	9.344.507.869,00	716.212.080.288	709.885.059.607,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48.240.000	48.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.564.701.700	1.552.901.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah				3.573.233.009.852	3.410.559.545.501,00	514.135.348.073	478.767.157.553,00	15.155.305.600	9.344.507.869,00	716.212.080.288	709.885.059.607,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



PEMERINTAH KAB. CIREBON
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE 1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	2024	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86
SUBTOTAL (1-2)	0,00	0,00
SILPA/(SIKPA)	80.554.309.798,49	184.475.499.831,21
SUBTOTAL (3+4)	80.554.309.798,49	184.475.499.831,21
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	80.554.309.798,49	184.475.499.831,21

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



PEMERINTAH KAB. CIREBON
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE 1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	2024	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86
SUBTOTAL (1-2)	0,00	0,00
SILPA/(SIKPA)	80.554.309.798,49	184.475.499.831,21
SUBTOTAL (3+4)	80.554.309.798,49	184.475.499.831,21
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	80.554.309.798,49	184.475.499.831,21

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Beban Tak Terduga	3.192.737.556,00	5.063.709.264,00	(1.870.971.708,00)	(36,95%)
JUMLAH BEBAN	3.989.336.046.872,14	3.567.877.044.444,18	421.459.002.427,96	11,81%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	158.447.748.808,53	103.093.546.088,53	55.354.202.720,00	53,69%
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non lancar	9.542.635.420,00	-	9.542.635.420,00	100,00%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	1.095.574.216,00	(1.095.574.216,00)	(100,00%)
Defisit Penjualan Aset Non lancar	(312.983.964,00)	-	(312.983.964,00)	100,00%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(51.660.000,00)	(30,00)	(51.659.970,00)	172.199.900 %
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	9.177.991.456,00	1.095.574.186,00	8.082.417.270,00	737,73%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	167.625.740.264,53	104.189.120.274,53	63.436.619.990,00	60,89%
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/ DEFISIT-LO	167.625.740.264,53	104.189.120.274,53	63.436.619.990,00	60,89%

BUPATI CIREBON,

Beban Tak Terduga	3.192.737.556,00	5.063.709.264,00	(1.870.971.708,00)	(36,95%)
JUMLAH BEBAN	3.989.336.046.872,14	3.567.877.044.444,18	421.459.002.427,96	11,81%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	158.447.748.808,53	103.093.546.088,53	55.354.202.720,00	53,69%
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non lancar	9.542.635.420,00	-	9.542.635.420,00	100,00%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	1.095.574.216,00	(1.095.574.216,00)	(100,00%)
Defisit Penjualan Aset Non lancar	(312.983.964,00)	-	(312.983.964,00)	100,00%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(51.660.000,00)	(30,00)	(51.659.970,00)	172.199.900 %
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	9.177.991.456,00	1.095.574.186,00	8.082.417.270,00	737,73%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	167.625.740.264,53	104.189.120.274,53	63.436.619.990,00	60,89%
Beban Luar Biasa	-	-	-	



PEMERINTAH KAB. CIREBON
KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	4.912.019.515.681,26	4.749.584.103.826,84
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	167.625.740.264,53	104.189.120.274,53
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	341.555.694,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	3.424.927.197,48	1.011.025,00
LAIN-LAIN	37.168.319.323,97	58.245.280.554,89
EKUITAS AKHIR	5.120.580.058.161,24	4.912.019.515.681,26

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



PEMERINTAH KAB. CIREBON
KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	4.912.019.515.681,26	4.749.584.103.826,84
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	167.625.740.264,53	104.189.120.274,53
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	341.555.694,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	3.424.927.197,48	1.011.025,00
LAIN-LAIN	37.168.319.323,97	58.245.280.554,89
EKUITAS AKHIR	5.120.580.058.161,24	4.912.019.515.681,26

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

URAIAN	2024	2023 (Audited)
Aset Tetap Lainnya	232.832.567.027,09	294.355.453.468,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	198.973.608.662,04	183.480.025.233,04
Akumulasi Penyusutan	(3.363.391.465.397,61)	(3.076.172.700.995,73)
DANA CADANGAN	-	40.000.000.000,00
Dana Cadangan	-	40.000.000.000,00
ASET LAINNYA	148.767.340.361,37	122.809.955.197,61
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	13.346.393.454,00
Aset Tidak Berwujud	30.310.060.279,50	47.196.161.250,69
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(23.745.860.949,5	

URAIAN	2024	2023 (Audited)
Aset Tetap Lainnya	232.832.567.027,09	294.355.453.468,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	198.973.608.662,04	183.480.025.233,04
Akumulasi Penyusutan	(3.363.391.465.397,61)	(3.076.172.700.995,73)
DANA CADANGAN	-	40.000.000.000,00
Dana Cadangan	-	40.000.000.000,00
ASET LAINNYA	148.767.340.361,37	122.809.955.197,61
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	13.346.393.454,00
Aset Tidak Berwujud	30.310.060.279,50	47.196.161.250,69
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(23.745.8	

URAIAN	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Masuk Kas :		
Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	40.000.000.000	-
Arus Keluar Kas :		
Pembentukan Dana Cadangan	-	40.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	4.999.999.663
Jumlah Arus Keluar Kas	-	44.999.999.663
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	40.000.000.000,00	- 44.999.999.663
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	262.860.579.764,79	239.836.052.393,06
Jumlah Arus Masuk Kas		

URAIAN	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Masuk Kas :		
Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	40.000.000.000	-
Arus Keluar Kas :		
Pembentukan Dana Cadangan	-	40.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	4.999.999.663
Jumlah Arus Keluar Kas	-	44.999.999.663
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	40.000.000.000,00	- 44.999.999.663
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	262.860.579.764,79	239.836.052.393,06
Jumlah Arus Masuk Kas	262.860.579.764,79	239.836.052.393,06
Arus Keluar Kas :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	262.860.579.764,79	239.836.052.393,06
Jumlah Arus Keluar Kas	262.860.579.764,79	239.836.052.393
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	0,00
Kenaikan / Penurunan Kas	-103.921.190.032,72	-160.482.427.603,65
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara, BLUD, JKN, BOS	184.475.499.831,21	344.957.927.434,86
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara, BLUD, JKN, BOS	80.554.309.798,49	184.475.499.831,21
Saldo Akhir Kas di BUD	38.755.724.764,00	126.026.094.434,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo Akhir Kas di BLUD	34.661.704.463,49	51.512.729.181,21
Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	-	-
Saldo Akhir Kas di BOS	-	79.079.064,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	-	6.857.597.152,00
Saldo Akhir Kas BOSP,	76.511.267,00	-
Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	7.060.369.304,00	-
Saldo Akhir Kas	80.554.309.798,49	184.475.499.831,21

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

BAB XII

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Daerah. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

BAB XII

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Daerah. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	DINAS KESEHATAN	Piutang Retribusi	-	3.438.341.479,00	-	3.438.341.479,00
		Piutang Lain-lain PAD yang sah	9.182.730.291,00	2.037.980.000,00	- 9.182.730.291,00	2.037.980.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Piutang Retribusi		175.755.727,00	-	175.755.727,00
3	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Piutang Retribusi	46.635.000,00	-	-	46.635.000,00
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.683.818.841,00	15.111.908.406,00	- 14.683.818.841,00	15.111.908.406,00
4	PPKD	Piutang Lain-lain PAD yang sah	4.782.769.106,00	4.734.485.178,00	- 4.782.769.106,00	4.734.485.178,00
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	20.086.855.000,00	-	20.086.855.000,00
		Piutang Transfer Antar Daerah	14.937.828.270,00	12.960.076.119,00	- 14.937.828.270,00	12.960.076.119,00
		Piutang Lainnya	558.583.050,00	-	- 48.160.000,00	510.423.050,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang Pajak	94.605.736.132,50	113.408.970.132,50	- 94.605.736.132,50	113.408.970.132,50
J U M L A H			138.798.100.690,50	171.954.372.041,50	(138.241.042.640,50)	172.511.430.091,50

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	DINAS KESEHATAN	Piutang Retribusi	-	3.438.341.479,00	-	3.438.341.479,00
		Piutang Lain-lain PAD yang sah	9.182.730.291,00	2.037.980.000,00	- 9.182.730.291,00	2.037.980.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Piutang Retribusi		175.755.727,00	-	175.755.727,00
3	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Piutang Retribusi	46.635.000,00	-	-	46.635.000,00
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.683.818.841,00	15.111.908.406,00	- 14.683.818.841,00	15.111.908.406,00
4	PPKD	Piutang Lain-lain PAD yang sah	4.782.769.106,00	4.734.485.178,00	- 4.782.769.106,00	4.734.485.178,00
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	20.086.855.000,00	-	20.086.855.000,00
		Piutang Transfer Antar Daerah	14.937.828.270,00	12.960.076.119,00	- 14.937.828.270,00	12.960.076.119,00
		Piutang Lainnya	558.583.050,00	-	- 48.160.000,00	510.423.050,00
		Piutang Pajak	94.605.736.132,50	113.408.970.132,50	- 94.605.736.132,50	113.408.970.132,50
J U M L A H			138.798.100.690,50	171.954.372.041,50	(138.241.042.640,50)	172.511.430.091,50

BUPATI CIREBON,

 TTD

 IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Piutang Pajak	113.408.970.132,50	(65.704.342.400,37)	47.704.627.732,13
2	Piutang Retribusi	3.660.732.206,00	(695.391.038,68)	2.965.341.167,32
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.111.908.406,00	(75.559.542,04)	15.036.348.863,96
4	Piutang Lain-lain PAD yang sah	6.772.465.178,00	(3.918.573.577,78)	2.853.891.600,22
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	20.086.855.000,00	(100.434.275,00)	19.986.420.725,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	12.960.076.119,00	(64.800.380,60)	12.895.275.738,40
7	Piutang Lainnya	510.423.050,00	(510.423.050,00)	-
J U M L A H		172.511.430.091,50	(71.069.524.264,47)	101.441.905.827,03

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	Piutang Pajak	113.408.970.132,50	(65.704.342.400,37)	47.704.627.732,13
2	Piutang Retribusi	3.660.732.206,00	(695.391.038,68)	2.965.341.167,32
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.111.908.406,00	(75.559.542,04)	15.036.348.863,96
4	Piutang Lain-lain PAD yang sah	6.772.465.178,00	(3.918.573.577,78)	2.853.891.600,22
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	20.086.855.000,00	(100.434.275,00)	19.986.420.725,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	12.960.076.119,00	(64.800.380,60)	12.895.275.738,40
7	Piutang Lainnya	510.423.050,00	(510.423.050,00)	-
J U M L A H		172.511.430.091,50	(71.069.524.264,47)	101.441.905.827,03

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	Sekretariat Daerah	9.450.000.000,00	(4.044.063.749,00)	5.405.936.251,00
2	Sekretariat Daerah	1.125.000.000,00	(346.639.294,00)	778.360.706,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000.000,00	(1.796.201.552,00)	203.798.448,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.500.000.000,00	(1.317.164.719,00)	182.835.281,00
J U M L A H		14.075.000.000,00	(7.504.069.314,00)	6.570.930.686,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	Sekretariat Daerah	9.450.000.000,00	(4.044.063.749,00)	5.405.936.251,00
2	Sekretariat Daerah	1.125.000.000,00	(346.639.294,00)	778.360.706,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000.000,00	(1.796.201.552,00)	203.798.448,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.500.000.000,00	(1.317.164.719,00)	182.835.281,00
J U M L A H		14.075.000.000,00	(7.504.069.314,00)	6.570.930.686,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai dengan akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2012	Bank bjb	Perda No. 11 Th 2016		44.400.000.000,00	23.451.413.300,00	-	23.451.413.300,00	20.948.586.700,00	-	-	23.451.413.300,00
2	2012	PT. BPR Cirebon Jabar	Perda No. 05 Th 2019		68.000.000.000,00	21.750.948.000,00	-	21.750.948.000,00	49.060.500.000,00	-	-	21.750.948.000,00
3	2012	Perumda BPR Kabupaten Cirebon	Perda No. 05 Th 2019		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-	-	-	50.000.000.000,00
4	2012	PDAM	Perda No. 3 Th 2019		64.473.331.277,00	64.473.331.277,00	-	64.473.331.277,00	-	-	-	64.473.331.277,00
J U M L A H					226.873.331.277,00	159.675.692.577,00	-	159.675.692.577,00	70.009.086.700,00	-	-	159.675.692.577,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai dengan akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2012	Bank bjb	Perda No. 11 Th 2016		44.400.000.000,00	23.451.413.300,00	-	23.451.413.300,00	20.948.586.700,00	-	-	23.451.413.300,00
2	2012	PT. BPR Cirebon Jabar	Perda No. 05 Th 2019		68.000.000.000,00	21.750.948.000,00	-	21.750.948.000,00	49.060.500.000,00	-	-	21.750.948.000,00
3	2012	Perumda BPR Kabupaten Cirebon	Perda No. 05 Th 2019		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	50.000.000.000,00	-	-	-	50.000.000.000,00
4	2012	PDAM	Perda No. 3 Th 2019		64.473.331.277,00	64.473.331.277,00	-	64.473.331.277,00	-	-	-	64.473.331.277,00
J U M L A H					226.873.331.277,00	159.675.692.577,00	-	159.675.692.577,00	70.009.086.700,00	-	-	159.675.692.577,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	DINAS PENDIDIKAN	1.410.756.704.365,00	186.086.361.772,00	(74.334.108.308,00)	1.522.508.957.829,00
2	DINAS KESEHATAN	1.171.894.993.072,87	55.803.030.724,45	(9.668.952.582,00)	1.218.029.071.215,32
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.154.279.605.542,51	215.157.572.467,00	(20.134.649.247,41)	3.349.302.528.762,10
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	146.033.168.393,57	87.205.903.812,00	(13.136.812.310,00)	220.102.259.895,57
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.335.678.087,16	266.091.000,00	(842.259.202,00)	7.759.509.885,16
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	31.259.574.984,64	1.733.905.162,00	(774.825.585,00)	32.218.654.561,64
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.475.332.158,00	705.870.210,00	(346.307.000,00)	5.834.895.368,00
8	DINAS SOSIAL	15.239.377.976,00	722.068.522,00	(681.024.732,00)	15.280.421.766,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	35.596.949.896,00	9.950.206.823,00	(958.496.849,00)	44.588.659.870,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	36.762.568.117,41	2.391.559.985,00	(5.715.641.494,00)	33.438.486.608,41
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	157.981.542.458,00	33.485.865.120,00	(2.247.520.262,00)	189.219.887.316,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.901.802.951,21	2.212.254.000,00	(9.539.202,00)	21.104.517.749,21
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.820.911.565,05	322.392.000,00	(311.001.000,00)	7.832.302.565,05
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	19.444.279.480,25	1.460.057.000,00	(3.805.558.823,09)	17.098.777.657,16
15	DINAS PERHUBUNGAN	121.793.321.816,24	27.727.106.517,00	(17.990.331.317,00)	131.530.097.016,24
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.238.646.721,27	2.307.351.690,00	(1.202.656.829,97)	26.343.341.581,30
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.746.303.060,33	355.417.171,00	(408.010.388,00)	11.693.709.843,33
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.994.393.159,61	772.177.544,00	(893.044.692,61)	19.873.526.011,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	242.136.579.160,68	628.246.326,00	(333.370.899,00)	242.431.454.587,68
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	20.045.723.341,39	1.226.446.396,00	(1.457.237.883,00)	19.814.931.854,39
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	18.447.282.531,00	3.969.773.400,00	(1.110.661.589,00)	21.306.394.342,00
22	DINAS PERTANIAN	59.334.286.721,72	1.143.349.570,00	(1.312.978.120,00)	59.164.658.171,72
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	131.271.895.440,00	71.108.306.098,00	(22.058.885.603,00)	180.321.315.935,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	123.280.105.324,80	6.762.944.213,00	(2.301.292.887,00)	127.741.756.650,80
25	SEKRETARIAT DPRD	48.081.284.735,14	2.788.617.000,00	(390.305.482,00)	50.479.596.253,14
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.368.502.921,13	1.101.088.712,00	(1.420.509.652,69)	15.049.081.980,44
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	161.370.782.120,70	170.272.038.372,55	(142.905.240.717,80)	188.737.579.775,45
29	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.981.069.806,42	631.933.250,00	(745.774.261,25)	14.867.228.795,17
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.172.791.641,00	1.482.466.942,00	(1.029.114.101,00)	17.626.144.482,00
31	INSPEKTORAT	12.947.876.890,04	8.292.073.500,00	(1.806.261.224,15)	19.433.689.165,89
32	KECAMATAN WALED	1.823.499.519,00	149.217.496,00	(75.844.202,00)	1.896.872.813,00
33	KECAMATAN CILEDUG	1.909.129.426,00	241.136.350,00	(343.127.602,00)	1.807.138.174,00
34	KECAMATAN LOSARI	4.496.501.585,00	11.074.000,00	(119.043.800,00)	4.388.531.785,00
35	KECAMATAN PABEDILAN	627.384.667,00	418.398.000,00	(91.781.202,00)	954.001.465,00
36	KECAMATAN BABAKAN	1.439.812.544,00	2.732.000,00	(77.618.000,00)	1.364.926.544,00
37	KECAMATAN GEBANG	1.443.915.102,00	41.151.000,00	(87.108.202,00)	1.397.957.900,00
38	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	3.414.448.802,00	149.493.000,00	(54.322.602,00)	3.509.619.200,00
39	KECAMATAN LEMAHABANG	3.435.167.117,00	87.215.000,00	(121.345.202,00)	3.401.036.915,00
40	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	1.704.225.000,00	88.964.000,00	-	1.793.189.000,00
41	KECAMATAN SEDONG	1.815.689.309,00	135.917.561,00	(171.079.202,00)	1.780.527.668,00
42	KECAMATAN ASTANAJAPURA	1.816.036.635,00	35.632.000,00	(143.817.183,00)	1.707.851.452,00
43	KECAMATAN PANGENAN	697.742.201,04	-	(87.756.000,00)	609.986.201,04
44	KECAMATAN MUNDU	2.058.255.653,00	114.674.000,00	(161.385.202,00)	2.011.544.451,00
45	KECAMATAN BEBER	2.049.478.867,00	243.176.000,00	(173.416.702,00)	2.119.238.165,00
46	KECAMATAN TALUN	1.451.142.643,32	28.354.000,00	(104.021.340,00)	1.375.475.303,32
47	KECAMATAN SUMBER	44.508.149.251,00	6.815.572.768,00	(13.076.000,00)	51.310.646.019,00
48	KECAMATAN DUKUPUNTANG	1.607.721.159,00	208.378.700,00	(336.050.702,00)	1.480.049.157,00
49	KECAMATAN PALIMANAN	1.812.645.954,00	16.206.000,00	(172.939.075,00)	1.655.912.879,00
50	KECAMATAN PLUMBON	1.886.621.227,00	280.308.094,00	(139.079.202,00)	2.027.850.119,00
51	KECAMATAN DEPOK	1.592.919.748,00	41.247.020,00	(357.017.702,00)	1.277.149.066,00
52	KECAMATAN WERU	1.103.582.030,00	132.035.000,00	(99.722.000,00)	1.135.895.030,00
53	KECAMATAN KEDAWUNG	1.776.636.970,00	46.200.000,00	(139.544.202,00)	1.683.292.768,00
54	KECAMATAN GUNUNGJATI	1.904.714.316,00	147.245.000,00	(235.326.667,00)	1.816.632.649,00
55	KECAMATAN KAPETAKAN	1.947.719.240,00	7.313.000,00	(373.716.000,00)	1.581.316.240,00
56	KECAMATAN KLANGENAN	1.461.049.972,00	183.589.000,00	(50.331.202,00)	1.594.307.770,00
57	KECAMATAN ARJAWINANGUN	1.185.068.000,00	3.514.366.000,00	(152.609.000,00)	4.546.825.000,00
58	KECAMATAN PANGURAGAN	1.240.142.750,00	34.909.000,00	(12.844.000,00)	1.262.207.750,00
59	KECAMATAN CIWARINGIN	1.491.362.917,00	33.141.000,00	(149.856.702,00)	1.374.647.215,00
60	KECAMATAN SUSUKAN	1.411.547.437,00	157.898.000,00	-	1.569.445.437,00
61	KECAMATAN GEGESIK	1.687.102.067,00	153.059.000,00	(68.318.202,00)	1.771.842.865,00
62	KECAMATAN KALIWEDI	1.380.493.126,00	186.610.000,00	(158.794.202,00)	1.408.308.924,00
63	KECAMATAN KARANGWARENG	1.719.659.872,00	14.195.000,00	(161.000.202,00)	1.572.854.670,00
64	KECAMATAN TENGAH TANI	1.715.047.225,00	172.816.000,00	(178.836.700,00)	1.709.026.525,00
65	KECAMATAN GEMPOL	2.120.960.550,00	202.370.000,00	(128.553.700,00)	2.194.776.850,00
66	KECAMATAN PASALEMAN	2.276.414.610,00	88.312.700,00	(82.781.000,00)	2.281.946.310,00
67	KECAMATAN PLERED	2.359.402.850,00	157.527.000,00	(125.767.640,00)	2.391.162.210,00
68	KECAMATAN PABUARAN	1.303.037.450,00	12.592.000,00	(98.076.500,00)	1.217.552.950,00
69	KECAMATAN GREGED	2.018.450.719,00	12.712.000,00	(4.319.202,00)	2.026.843.517,00
70	KECAMATAN JAMBLANG	2.185.832.523,00	99.631.000,00	(152.720.240,00)	2.132.743.283,00
71	KECAMATAN SURANENGGA	2.777.055.649,00	38.221.000,00	-	2.815.276.649,00
72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.731.456.117,83	2.079.878.700,00	(1.134.759.202,00)	11.676.575.615,83
JUMLAH		7.390.380.557.239,33	914.655.942.688,00	(336.670.077.928,97)	7.968.366.421.998,36

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	DINAS PENDIDIKAN	1.410.756.704.365,00	186.086.361.772,00	(74.334.108.308,00)	1.522.508.957.829,00
2	DINAS KESEHATAN	1.171.894.993.072,87	55.803.030.724,45	(9.668.952.582,00)	1.218.029.071.215,32
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3.154.279.605.542,51	215.157.572.467,00	(20.134.649.247,41)	3.349.302.528.762,10
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	146.033.168.393,57	87.205.903.812,00	(13.136.812.310,00)	220.102.259.895,57
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.335.678.087,16	266.091.000,00	(842.259.202,00)	7.759.509.885,16
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	31.259.574.984,64	1.733.905.162,00	(774.825.585,00)	32.218.654.561,64
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.475.332.158,00	705.870.210,00	(346.307.000,00)	5.834.895.368,00
8	DINAS SOSIAL	15.239.377.976,00	722.068.522,00	(681.024.732,00)	15.280.421.766,00
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	35.596.949.896,00	9.950.206.823,00	(958.496.849,00)	44.588.659.870,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	36.762.588.117,41	2.391.559.985,00	(5.715.641.494,00)	33.438.486.608,41
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	157.981.542.458,00	33.485.865.120,00	(2.247.520.262,00)	189.219.887.316,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.901.802.951,21	2.212.254.000,00	(9.539.202,00)	21.104.517.749,21
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.820.911.565,05	322.392.000,00	(311.001.000,00)	7.832.302.565,05
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	19.444.279.480,25	1.460.057.000,00	(3.805.558.823,09)	17.098.777.657,16
15	DINAS PERHUBUNGAN	121.793.321.816,24	27.727.106.517,00	(17.990.331.317,00)	131.530.097.016,24
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.238.646.721,27	2.307.351.690,00	(1.202.656.829,97)	26.343.341.581,30
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.746.303.060,33	355.417.171,00	(408.010.388,00)	11.693.709.843,33
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.994.393.159,61	772.177.544,00	(893.044.692,61)	19.873.526.011,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	242.136.579.160,68	628.246.326,00	(333.370.899,00)	242.431.454.587,68
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	20.045.723.341,39	1.226.446.396,00	(1.457.237.883,00)	19.814.931.854,39
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	18.447.282.531,00	3.969.773.400,00	(1.110.661.589,00)	21.306.394.342,00
22	DINAS PERTANIAN	59.334.286.721,72	1.143.349.570,00	(1.312.978.120,00)	59.164.658.171,72
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	131.271.895.440,00	71.108.306.098,00	(22.058.885.603,00)	180.321.315.935,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	123.280.105.324,80	6.762.944.213,00	(2.301.292.887,00)	127.741.756.650,80
25	SEKRETARIAT DPRD	48.081.284.735,14	2.788.617.000,00	(390.305.482,00)	50.479.596.253,14
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15.368.502.921,13	1.101.088.712,00	(1.420.509.652,69)	15.049.081.980,44
28	BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	161.370.782.120,70	170.272.038.372,55	(142.905.240.717,80)	188.737.579.775,45
29	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.981.069.806,42	631.933.250,00	(745.774.261,25)	14.867.228.795,17
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.172.791.641,00	1.482.466.942,00	(1.029.114.101,00)	17.626.144.482,00
31	INSPEKTORAT	12.947.876.890,04	8.292.073.500,00	(1.806.261.224,15)	19.433.689.165,89
32	KECAMATAN WALED	1.823.499.519,00	149.217.496,00	(75.844.202,00)	1.896.872.813,00
33	KECAMATAN CILEDUG	1.909.129.426,00	241.136.350,00	(343.127.602,00)	1.807.138.174,00
34	KECAMATAN LOSARI	4.496.501.585,00	11.074.000,00	(119.043.800,00)	4.388.531.785,00
35	KECAMATAN PABEDILAN	627.384.667,00	418.398.000,00	(91.781.202,00)	954.001.465,00
36	KECAMATAN BABAKAN	1.439.812.544,00	2.732.000,00	(77.618.000,00)	1.364.926.544,00
37	KECAMATAN GEBANG	1.443.915.102,00	41.151.000,00	(87.108.202,00)	1.397.957.900,00
38	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	3.414.448.802,00	149.493.000,00	(54.322.602,00)	3.509.619.200,00
39	KECAMATAN LEMAHABANG	3.435.167.117,00	87.215.000,00	(121.345.202,00)	3.401.036.915,00
40	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	1.704.225.000,00	88.964.000,00	-	1.793.189.000,00
41	KECAMATAN SEDONG	1.815.689.309,00	135.917.561,00	(171.079.202,00)	1.780.527.668,00
42	KECAMATAN ASTANAJAPURA	1.816.036.635,00	35.632.000,00	(143.817.183,00)	1.707.851.452,00
43	KECAMATAN PANGENAN	697.742.201,04	-	(87.756.000,00)	609.986.201,04
44	KECAMATAN MUNDU	2.058.255.653,00	114.674.000,00	(161.385.202,00)	2.011.544.451,00
45	KECAMATAN BEBER	2.049.478.867,00	243.176.000,00	(173.416.702,00)	2.119.238.165,00
46	KECAMATAN TALUN	1.451.142.643,32	28.354.000,00	(104.021.340,00)	1.375.475.303,32
47	KECAMATAN SUMBER	44.508.149.251,00	6.815.572.768,00	(13.076.000,00)	51.310.646.019,00
48	KECAMATAN DUKUPUNTANG	1.607.721.159,00	208.378.700,00	(336.050.702,00)	1.480.049.157,00
49	KECAMATAN PALIMANAN	1.812.645.954,00	16.206.000,00	(172.939.075,00)	1.655.912.879,00
50	KECAMATAN PLUMBON	1.886.621.227,00	280.308.094,00	(139.079.202,00)	2.027.850.119,00
51	KECAMATAN DEPOK	1.592.919.748,00	41.247.020,00	(357.017.702,00)	1.277.149.066,00
52	KECAMATAN WERU	1.103.582.030,00	132.035.000,00	(99.722.000,00)	1.135.895.030,00
53	KECAMATAN KEDAWUNG	1.776.636.970,00	46.200.000,00	(139.544.202,00)	1.683.292.768,00
54	KECAMATAN GUNUNGIATI	1.904.714.316,00	147.245.000,00	(235.326.667,00)	1.816.632.649,00
55	KECAMATAN KAPETAKAN	1.947.719.240,00	7.313.000,00	(373.716.000,00)	1.581.316.240,00
56	KECAMATAN KLANGENAN	1.461.049.972,00	183.589.000,00	(50.331.202,00)	1.594.307.770,00
57	KECAMATAN ARJAWINANGUN	1.185.068.000,00	3.514.366.000,00	(152.609.000,00)	4.546.825.000,00
58	KECAMATAN PANGURAGAN	1.240.142.750,00	34.909.000,00	(12.844.000,00)	1.262.207.750,00
59	KECAMATAN CIWARINGIN	1.491.362.917,00	33.141.000,00	(149.856.702,00)	1.374.647.215,00
60	KECAMATAN SUSUKAN	1.411.547.437,00	157.898.000,00	-	1.569.445.437,00
61	KECAMATAN GEGESIK	1.687.102.067,00	153.059.000,00	(68.318.202,00)	1.771.842.865,00
62	KECAMATAN KALIWEDI	1.380.493.126,00	186.610.000,00	(158.794.202,00)	1.408.308.924,00
63	KECAMATAN KARANGWARENG	1.719.659.872,00	14.195.000,00	(161.000.202,00)	1.572.854.670,00
64	KECAMATAN TENGAH TANI	1.715.047.225,00	172.816.000,00	(178.836.700,00)	1.709.026.525,00
65	KECAMATAN GEMPOL	2.120.960.550,00	202.370.000,00	(128.553.700,00)	2.194.776.850,00
66	KECAMATAN PASALEMAN	2.276.414.610,00	88.312.700,00	(82.781.000,00)	2.281.946.310,00
67	KECAMATAN PLERED	2.359.402.850,00	157.527.000,00	(125.767.640,00)	2.391.162.210,00
68	KECAMATAN PABUARAN	1.303.037.450,00	12.592.000,00	(98.076.500,00)	1.217.552.950,00
69	KECAMATAN GREGED	2.018.450.719,00	12.712.000,00	(4.319.202,00)	2.026.843.517,00
70	KECAMATAN JAMBLANG	2.185.832.523,00	99.631.000,00	(152.720.240,00)	2.132.743.283,00
71	KECAMATAN SURANENGGA	2.777.055.649,00	38.221.000,00	-	2.815.276.649,00
72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.731.456.117,83	2.079.878.700,00	(1.134.759.202,00)	11.676.575.615,83
J U M L A H		7.390.380.557.239,33	914.655.942.688,00	(336.670.077.928,97)	7.968.366.421.998,36

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	578.445.158.914,30	189.092.110.100,00	(83.626.001.600,00)	683.911.267.414,30
2	Peralatan dan Mesin	1.249.483.790.579,97	183.969.222.516,55	(73.233.330.668,97)	1.360.219.682.427,55
3	Gedung dan Bangunan	2.098.357.958.411,48	235.629.335.740,45	(70.111.225.947,00)	2.263.876.068.204,93
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.986.258.170.632,45	288.362.259.092,00	(46.067.201.462,00)	3.228.553.228.262,45
5	Aset Tetap Lainnya	294.355.453.468,09	1.093.665.300,00	(62.616.551.741,00)	232.832.567.027,09
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	183.480.025.233,04	16.509.349.939,00	(1.015.766.510,00)	198.973.608.662,04
7	Akumulasi Penyusutan	(3.076.172.700.995,73)	(315.428.473.423,78)	28.209.709.021,90	(3.363.391.465.397,61)
TOTAL		4.314.207.856.243,60	599.227.469.264,22	(308.460.368.907,07)	4.604.974.956.600,75

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	578.445.158.914,30	189.092.110.100,00	(83.626.001.600,00)	683.911.267.414,30
2	Peralatan dan Mesin	1.249.483.790.579,97	183.969.222.516,55	(73.233.330.668,97)	1.360.219.682.427,55
3	Gedung dan Bangunan	2.098.357.958.411,48	235.629.335.740,45	(70.111.225.947,00)	2.263.876.068.204,93
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.986.258.170.632,45	288.362.259.092,00	(46.067.201.462,00)	3.228.553.228.262,45
5	Aset Tetap Lainnya	294.355.453.468,09	1.093.665.300,00	(62.616.551.741,00)	232.832.567.027,09
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	183.480.025.233,04	16.509.349.939,00	(1.015.766.510,00)	198.973.608.662,04
7	Akumulasi Penyusutan	(3.076.172.700.995,73)	(315.428.473.423,78)	28.209.709.021,90	(3.363.391.465.397,61)
TOTAL		4.314.207.856.243,60	599.227.469.264,22	(308.460.368.907,07)	4.604.974.956.600,75

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	MUTASI								Saldo Per 31 Desember 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG				
			Aset Tetap Lainnya	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	
1	DINAS KESEHATAN	1.517.813.860,00	-	217.163.500,00	-	-	-	(705.878.460,00)	-	-	1.029.098.900,00
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	208.477.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	208.477.000,00
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN	144.345.000,00	-	-	-	-	-	(54.834.000,00)	-	-	89.511.000,00
4	DINAS KETENAGAKERJAAN	98.346.000,00	-	927.039.439,00	-	-	-	(49.173.000,00)	-	-	976.212.439,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	118.902.450,00	-	-	-	-	-	(118.902.450,00)	-	-	-
6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	180.898.749.823,04	-	49.594.800,00	-	-	-	-	-	-	180.948.344.623,04
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	187.749.000,00	-	79.444.400,00	-	-	-	-	-	-	267.193.400,00
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	66.666.600,00	-	-	-	-	-	(66.666.600,00)	-	-	-
9	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	218.663.500,00	-	15.236.107.800,00	-	-	-	-	-	-	15.454.771.300,00
10	INSPEKTORAT	20.312.000,00	-	-	-	-	-	(20.312.000,00)	-	-	-
J U M L A H		183.480.025.233,04	-	16.509.349.939,00	-	-	-	(1.015.766.510,00)	-	-	198.973.608.662,04

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	MUTASI								Saldo Per 31 Desember 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG				
			Aset Tetap Lainnya	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	
1	DINAS KESEHATAN	1.517.813.860,00	-	217.163.500,00	-	-	-	(705.878.460,00)	-	-	1.029.098.900,00
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	208.477.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	208.477.000,00
3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN	144.345.000,00	-	-	-	-	-	(54.834.000,00)	-	-	89.511.000,00
4	DINAS KETENAGAKERJAAN	98.346.000,00	-	927.039.439,00	-	-	-	(49.173.000,00)	-	-	976.212.439,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	118.902.450,00	-	-	-	-	-	(118.902.450,00)	-	-	-
6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	180.898.749.823,04	-	49.594.800,00	-	-	-	-	-	-	180.948.344.623,04
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	187.749.000,00	-	79.444.400,00	-	-	-	-	-	-	267.193.400,00
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	66.666.600,00	-	-	-	-	-	(66.666.600,00)	-	-	-
9	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	218.663.500,00	-	15.236.107.800,00	-	-	-	-	-	-	15.454.771.300,00
10	INSPEKTORAT	20.312.000,00	-	-	-	-	-	(20.312.000,00)	-	-	-
J U M L A H		183.480.025.233,04	-	16.509.349.939,00	-	-	-	(1.015.766.510,00)	-	-	198.973.608.662,04

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	106.531.644,00	27.415.981,00	(54.039.800,00)	79.907.825,00
42	KECAMATAN PANGENAN	52.216.008,00	87.756.000,00	(79.077.000,00)	60.895.008,00
43	KECAMATAN MUNDU	32.062.582,61	-	-	32.062.582,61
44	KECAMATAN BEBER	77.570.937,00	-	(9.014.500,00)	68.556.437,00
45	KECAMATAN TALUN	0,00	-	-	-
46	KECAMATAN SUMBER	256.000.000,00	-	-	256.000.000,00
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	96.606.000,00	-	(63.000.000,00)	33.606.000,00
48	KECAMATAN PALIMANAN	9.991.000,00	64.927.075,00	-	74.918.075,00
49	KECAMATAN PLUMBON	19.780.000,00	-	-	19.780.000,00
50	KECAMATAN DEPOK	16.441.198,00	-	-	16.441.198,00
51	KECAMATAN WERU	94.291.800,00	-	(51.808.400,00)	42.483.400,00
52	KECAMATAN KEDAWUNG	0,00	-	-	-
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	11.400.000,00	78.435.465,00	-	89.835.465,00
54	KECAMATAN KAPETAKAN	2.300.000,00	12.369.950,00	(12.369.950,00)	2.300.000,00
55	KECAMATAN KLANGENAN	79.658.050,00	-	(51.475.100,00)	28.182.950,00
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	42.401.202,00	22.076.000,00	-	64.477.202,00
57	KECAMATAN PANGURAGAN	58.749.400,00	12.844.000,00	(20.820.000,00)	50.773.400,00
58	KECAMATAN CIWARINGIN	0,00	-	-	-
59	KECAMATAN SUSUKAN	59.007.063,00	-	-	59.007.063,00
60	KECAMATAN GEGESIK	36.207.000,00	11.821.000,00	-	48.028.000,00
61	KECAMATAN KALIWEDI	27.959.500,00	-	-	27.959.500,00
62	KECAMATAN KARANGWARENG	46.493.150,00	-	-	46.493.150,00
63	KECAMATAN TENGAH TANI	31.229.400,00	55.184.000,00	-	86.413.400,00
64	KECAMATAN GEMPOL	25.207.000,00	-	-	25.207.000,00
65	KECAMATAN PASALEMAN	33.970.452,00	-	(4.319.202,00)	29.651.250,00
66	KECAMATAN PLERED	14.991.379,00	24.300.000,00	-	39.291.379,00
67	KECAMATAN PABUARAN	122.029.367,00	86.735.000,00	(91.054.202,00)	117.710.165,00
68	KECAMATAN GREGED	12.542.038,00	-	-	12.542.038,00
69	KECAMATAN JAMBLANG	15.942.700,00	-	-	15.942.700,00
70	KECAMATAN SURANENGGA	37.007.702,00	-	-	37.007.702,00
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	166.082.222,24	1.104.590.000,00	(881.994.444,46)	388.677.777,78
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-39.194.047.204,69	(3.044.471.431,00)	18.492.657.686,19	(23.745.860.949,50)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-51.562.247.544,01	(40.538.019.815,61)	31.766.290.110,11	(60.333.977.249,51)
J U M L A H		122.809.955.197,61	89.591.788.570,67	(63.634.403.406,91)	148.767.340.361,37

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	106.531.644,00	27.415.981,00	(54.039.800,00)	79.907.825,00
42	KECAMATAN PANGENAN	52.216.008,00	87.756.000,00	(79.077.000,00)	60.895.008,00
43	KECAMATAN MUNDU	32.062.582,61	-	-	32.062.582,61
44	KECAMATAN BEBER	77.570.937,00	-	(9.014.500,00)	68.556.437,00
45	KECAMATAN TALUN	0,00	-	-	-
46	KECAMATAN SUMBER	256.000.000,00	-	-	256.000.000,00
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	96.606.000,00	-	(63.000.000,00)	33.606.000,00
48	KECAMATAN PALIMANAN	9.991.000,00	64.927.075,00	-	74.918.075,00
49	KECAMATAN PLUMBON	19.780.000,00	-	-	19.780.000,00
50	KECAMATAN DEPOK	16.441.198,00	-	-	16.441.198,00
51	KECAMATAN WERU	94.291.800,00	-	(51.808.400,00)	42.483.400,00
52	KECAMATAN KEDAWUNG	0,00	-	-	-
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	11.400.000,00	78.435.465,00	-	89.835.465,00
54	KECAMATAN KAPETAKAN	2.300.000,00	12.369.950,00	(12.369.950,00)	2.300.000,00
55	KECAMATAN KLANGENAN	79.658.050,00	-	(51.475.100,00)	28.182.950,00
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	42.401.202,00	22.076.000,00	-	64.477.202,00
57	KECAMATAN PANGURAGAN	58.749.400,00	12.844.000,00	(20.820.000,00)	50.773.400,00
58	KECAMATAN CIWARINGIN	0,00	-	-	-
59	KECAMATAN SUSUKAN	59.007.063,00	-	-	59.007.063,00
60	KECAMATAN GEGESIK	36.207.000,00	11.821.000,00	-	48.028.000,00
61	KECAMATAN KALIWEDI	27.959.500,00	-	-	27.959.500,00
62	KECAMATAN KARANGWARENG	46.493.150,00	-	-	46.493.150,00
63	KECAMATAN TENGAH TANI	31.229.400,00	55.184.000,00	-	86.413.400,00
64	KECAMATAN GEMPOL	25.207.000,00	-	-	25.207.000,00
65	KECAMATAN PASALEMAN	33.970.452,00	-	(4.319.202,00)	29.651.250,00
66	KECAMATAN PLERED	14.991.379,00	24.300.000,00	-	39.291.379,00
67	KECAMATAN PABUARAN	122.029.367,00	86.735.000,00	(91.054.202,00)	117.710.165,00
68	KECAMATAN GREGED	12.542.038,00	-	-	12.542.038,00
69	KECAMATAN JAMBLANG	15.942.700,00	-	-	15.942.700,00
70	KECAMATAN SURANENGGA	37.007.702,00	-	-	37.007.702,00
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	166.082.222,24	1.104.590.000,00	(881.994.444,46)	388.677.777,78
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-39.194.047.204,69	(3.044.471.431,00)	18.492.657.686,19	(23.745.860.949,50)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-51.562.247.544,01	(40.538.019.815,61)	31.766.290.110,11	(60.333.977.249,51)
J U M L A H		122.809.955.197,61	89.591.788.570,67	(63.634.403.406,91)	148.767.340.361,37

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025



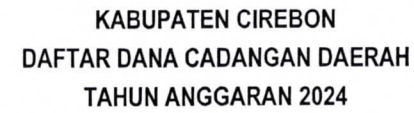
KABUPATEN CIREBON
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer Dari Kas Umum Daerah	Transfer Ke Kas Umum Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicapangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
		N	I	H	I	L		
J U M L A H			-	-	-	-	-	-

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

IMRON

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang PFK	-			-
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.901.411.235,34	3.179.530.723,34	2.901.411.235,34	3.179.530.723,34
3	Utang Belanja	62.347.101.596,80	85.919.795.369,36	62.347.101.596,80	85.919.795.369,36
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.962.916.795,00	4.748.383.000,00	6.962.916.795,00	4.748.383.000,00
J U M L A H		72.211.429.627,14	93.847.709.092,70	72.211.429.627,14	93.847.709.092,70

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025



KABUPATEN CIREBON
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN 2024

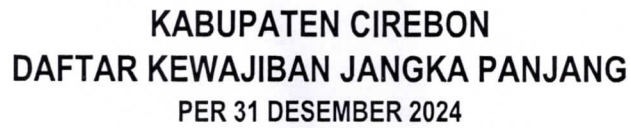
No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang PFK	-			-
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.901.411.235,34	3.179.530.723,34	2.901.411.235,34	3.179.530.723,34
3	Utang Belanja	62.347.101.596,80	85.919.795.369,36	62.347.101.596,80	85.919.795.369,36
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.962.916.795,00	4.748.383.000,00	6.962.916.795,00	4.748.383.000,00
J U M L A H		72.211.429.627,14	93.847.709.092,70	72.211.429.627,14	93.847.709.092,70

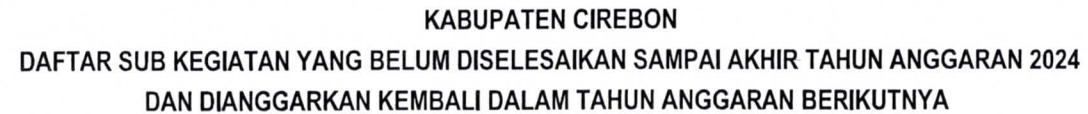
BUPATI CIREBON,

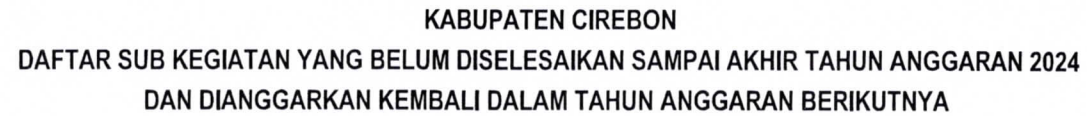
TTD

IMRON

IMRON

IMRON

IMRON

IMRON

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 X 18
I Bidang Perbankan																		
1.	PT. BPR Cirebon Jabar	Audited	Aktif	437.594.577.354,00	3.806.398.697,00	1.617.164.984,00	443.018.141.035,00	387.774.977.966,00	-	387.774.977.966,00	21.750.948.000,0	-	-	25.338.501.863,00	8.153.713.206,00	55.243.163.069,00	71,04%	38.242.392.558,46
2.	Perumda BPR Kabupaten Cirebon	Audited	Aktif	584.860.403.685,00	19.644.647.647,00	1.799.637.629,00	606.304.688.961,00	535.738.086.116,00	-	535.738.086.116,00	34.971.881.167,00	-	-	24.231.282.514,00	11.363.439.164,00	70.566.602.845,00	100%	70.566.602.845,00
II Bidang Pelayanan Air Minum																		
	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati	Audited	Aktif	28.043.397.150,00	74.703.103.290,00		102.746.500.440,00	10.116.685.557,00	15.542.959.119,00	25.659.644.676,00	64.473.331.277,00	-	-	11.595.149.150,00	1.018.375.337,00	77.086.855.764,00	100%	77.086.855.764,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 X 18
I	Bidang Perbankan																	
	1. PT. BPR Cirebon Jabar	Audited	Aktif	437.594.577,354,00	3.806.398.697,00	1.617.164.984,00	443.018.141.035,00	387.774.977.966,00	-	387.774.977.966,00	21.750.948.000,0	-		25.338.501.863,00	8.153.713.206,00	55.243.163.069,00	71,04%	39.242.392.558,46
	2. Perumda BPR Kabupaten Cirebon	Audited	Aktif	584.960.403.685,00	19.644.647.647,00	1.799.637.629,00	606.304.688.961,00	535.738.086.116,00	-	535.738.086.116,00	34.971.881.167,00	-		24.231.282.514,00	11.363.439.164,00	70.566.602.845,00	100%	70.566.602.845,00
II	Bidang Pelayanan Air Minum																	
	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati	Audited	Aktif	28.043.397.150,00	74.703.103.290,00		102.746.500.440,00	10.116.685.557,00	15.542.959.119,00	25.659.644.676,00	64.473.331.277,00	-		11.595.149.150,00	1.018.375.337,00	77.086.855.764,00	100%	77.086.855.764,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor : 6 Tahun 2025

Tanggal : 11 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan								
	1. PT. BPR Cirebon Jabar	1	S	45.974.232.511,00	35.391.453.679,00	10.582.778.832,00	202.303.378,00	251.299.444,00	10.533.782.766,00
	2. Perumda BPR Kabupaten Cirebon	1	S	65.355.145.151,00	49.381.774.053,00	15.973.371.098,00	1.101.471.407,00	1.827.299.487,00	15.247.543.018,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati	2	S	83.038.449.692,00	82.445.163.279,00	593.286.413,00	1.048.930.016,00	-	1.642.216.429,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor : 6 Tahun 2025

Tanggal : 11 Agustus 2025



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan								
	1. PT. BPR Cirebon Jabar	1	S	45.974.232.511,00	35.391.453.679,00	10.582.778.832,00	202.303.378,00	251.299.444,00	10.533.782.766,00
	2. Perumda BPR Kabupaten Cirebon	1	S	65.355.145.151,00	49.381.774.053,00	15.973.371.098,00	1.101.471.407,00	1.827.299.487,00	15.247.543.018,00
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati	2	S	83.038.449.692,00	82.445.163.279,00	593.286.413,00	1.048.930.016,00	-	1.642.216.429,00

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON